



# Eksplorasi Studi Bagaimana Krisis Keuangan Global 2008/2009 Membawa Implikasi Pada Mandat, Kebijakan Terhadap Kelembagaan Bank Sentral

Is'adil Mustafid<sup>1\*</sup>, Achmad Ramdhan Dzil Qarnain<sup>2</sup>, Rini Puji Astutik<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Perbankan Syariah, Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

<sup>2</sup> Perbankan Syariah, Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

<sup>3</sup> Perbankan Syariah, Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

\*[isadilmustafid1705@gmail.com](mailto:isadilmustafid1705@gmail.com), <sup>2</sup> [iniqarnainlo10@gmail.com](mailto:iniqarnainlo10@gmail.com), <sup>3</sup> [rinipuji.astuti11983@gmail.com](mailto:rinipuji.astuti11983@gmail.com)

## Abstrak

Krisis keuangan global 2008/2009 telah memberikan dampak signifikan terhadap mandat dan kebijakan bank sentral di seluruh dunia. Sebelum krisis, bank sentral cenderung memfokuskan tujuannya pada stabilitas harga guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah terjadinya krisis, terjadi evaluasi mendalam terhadap mandat bank sentral dengan mempertimbangkan stabilitas keuangan sebagai pendukung dari stabilitas moneter.

Alat kebijakan makroprudensial menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Evaluasi ini terutama dipicu oleh fakta bahwa krisis keuangan global mengungkapkan risiko keterkaitan antara sistem keuangan dan makroekonomi, yang dikenal sebagai keterkaitan makrofinansial. Bank sentral yang tidak dilengkapi dengan tugas pengawasan bank dan lembaga keuangan mikroprudensial menjadi tidak mampu memitigasi risiko makrofinansial yang muncul. Sehingga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bank sentral tidak hanya dapat mengandalkan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan nilai tukar. Mereka juga perlu mengedepankan stabilitas dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang mempertimbangkan risiko sistemik, dengan tujuan mendukung kestabilan ekonomi yang terorganisir dengan baik

**Kata Kunci:** Krisis Keuangan Global, Kebanksentralan, Stabilitas Moneter

## PENDAHULUAN

Kebanksentralan, bagaikan kompas yang mengarahkan perekonomian suatu bangsa, memiliki sejarah panjang dan penuh dinamika. Lahirnya bank sentral diiringi dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Awal mulanya, bank sentral didirikan oleh para pedagang dan pengusaha untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Seiring waktu, peran bank sentral berkembang pesat, menjadikannya sebagai lembaga penting yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi modern.

Sebelum terjadinya krisis keuangan global 2008/2009, bank sentral di berbagai negara memiliki fokus pada stabilitas harga (inflasi) sebagai tujuan utama mereka, sesuai dengan amanat undang-undang dan praktik kebijakan yang ada. Namun, beberapa bank sentral juga mempertimbangkan stabilisasi nilai tukar sebagai bagian dari upaya mencapai stabilitas harga. Bank sentral umumnya memiliki tiga tugas utama, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan bank. Namun, di beberapa negara seperti Australia dan Jepang, tugas pengawasan bank dialihkan ke lembaga yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi di Korea Selatan dan Indonesia setelah krisis Asia 1997-1998. Sebagai hasilnya, bank sentral lebih banyak memusatkan perhatian pada kebijakan moneter guna mencapai stabilitas harga yang menjadi mandat utama mereka.

Dalam praktiknya, kerangka kebijakan moneter yang dikenal sebagai Inflation Targeting Framework (ITF), yang bertujuan mencapai stabilitas harga, banyak digunakan dan dianut oleh berbagai negara maju dan negara-negara yang termasuk dalam Emerging Market Economies (EMEs), termasuk Indonesia. Namun, krisis keuangan global 2008/2009 tampaknya telah mengubah pandangan terhadap mandat dan praktik kebijakan bank sentral secara mendasar. Perubahan ini bukan karena kebijakan moneter berdasarkan ITF tersebut gagal. Sebaliknya, kebijakan moneter berdasarkan ITF berhasil menurunkan tingkat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan suku bunga selama dua dekade terakhir di banyak negara. Masalahnya adalah, fokus kebijakan moneter bank sentral pada stabilitas harga membuatnya kurang memperhitungkan risiko krisis yang timbul dari keterkaitan antara sistem keuangan dan makroekonomi, yang dikenal sebagai keterkaitan makrofinansial. Terutama pada bank sentral yang tidak lagi memiliki tugas pengawasan bank, serta dalam pengaturan dan pengawasan individual lembaga keuangan, yang tidak mampu mengurangi risiko makrofinansial tersebut karena lebih berfokus pada kesehatan individual lembaga keuangan.

Krisis keuangan global 2008/2009 mengungkapkan kembali kerentanan sistem ekonomi kapitalis yang bergantung

pada perdagangan modal dan uang melalui sistem keuangan untuk mendanai investasi. Seperti yang disebutkan oleh Minsky (1982), ketidakstabilan dalam sistem keuangan adalah hasil dari karakteristik ekonomi kapitalis, di mana kenaikan nilai aset dan akumulasi utang dapat menjadi tidak terkendali. Selama periode ekonomi yang naik, seperti era Great Moderation di AS yang ditandai dengan stabilitas inflasi yang terkendali dan suku bunga rendah, keuntungan dari investasi dan peningkatan nilai aset (baik finansial maupun fisik) sering kali melebihi biaya bunga utang atau modal. Keyakinan bahwa keuntungan investasi akan tetap tinggi selama periode ekonomi yang booming mendorong meningkatnya perdagangan modal untuk mendanai investasi tersebut. Akibatnya, akumulasi utang, baik melalui pinjaman perbankan maupun utang luar negeri, dapat menjadi tidak terkendali. Investor yang bersifat spekulatif atau beroperasi dalam model Ponzi cenderung mendominasi dibandingkan dengan investor yang berhati-hati dan melakukan lindung nilai. Pada akhirnya, investasi spekulatif dan model Ponzi ini sering mengalami kerugian yang mengarah pada ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Dengan demikian, menurut teori Minsky, stabilitas yang tampak dalam periode booming sebenarnya dapat menimbulkan destabilisasi di masa yang akan datang. Siklus ini akhirnya dapat memicu krisis ekonomi saat ekonomi yang mendahuluinya berubah menjadi bust.

Secara singkat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bank sentral tidak hanya dapat mengandalkan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan nilai tukar. Mereka juga perlu mengedepankan stabilitas dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang mempertimbangkan risiko sistemik, dengan tujuan mendukung kestabilan ekonomi yang terorganisir dengan baik.

## METODE

Metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan studi pustaka, yang memungkinkan penelitian ini untuk terfokus pada analisis literatur yang relevan dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang topik ini (Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M., 2019).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data teoretis yang diperoleh dari berbagai literatur akademis. Data tersebut disusun dengan cara menyadur, mengutip, dan menggunakan berbagai referensi dalam artikel ini. Penulis menggunakan pendekatan studi pustaka ini untuk memahami dan mengidentifikasi hubungan antara kebijakan moneter dan peran lembaga perbankan sebagai otoritas dalam pengaturan kebijakan moneter. Dalam proses ini, penulis mencari teks-teks

yang relevan, mengklasifikasikannya, dan menganalisis data-data tekstual baik yang bersumber dari literatur primer maupun sekunder yang berkaitan dengan fokus artikel ini serta sumber pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjalanannya, Pertama, selain memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga, bank sentral juga perlu memiliki mandat untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Dari satu sisi, kebijakan moneter yang meliputi suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan kredit perbankan serta keputusan perusahaan dan investor dalam berinvestasi, berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Pengalaman di Amerika Serikat (AS) secara jelas menunjukkan hal ini, di mana inflasi dan suku bunga yang rendah pada era Great Moderation menyebabkan munculnya gelembung properti, lonjakan kredit, perilaku berisiko berlebihan, serta tingkat utang dan leverage yang tinggi. Demikian pula, krisis Asia 1997/1998 menunjukkan bagaimana periode East Asian Miracle (era tahun 1960-an hingga 1990-an) menyebabkan ketidakseimbangan makrofinansial yang kemudian terungkap saat terjadi krisis, seperti gelembung kredit, gelembung properti, dan akumulasi utang luar negeri swasta yang berlebihan. Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan sangat penting dalam menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga perekonomian. Pengamatan terbaru di negara-negara maju, terutama di AS, kawasan Euro, dan Jepang, menunjukkan betapa kurang efektifnya kebijakan moneter yang sangat longgar dan suku bunga mendekati nol dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena terhambat oleh proses deleveraging dan restrukturisasi sektor keuangan yang hancur akibat krisis keuangan global 2008/2009. Hubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan sangat erat, saling melengkapi, dan bahkan saling memperkuat satu sama lain.

Kedua, ketidakseimbangan makrofinansial yang tercermin dalam siklus keuangan dan risiko sistemik tidak dapat diatasi hanya melalui kebijakan suku bunga atau pengaturan dan pengawasan mikroprudensial. Kebijakan moneter umumnya tidak sepenuhnya mempertimbangkan akumulasi risiko sistemik dari gelembung harga aset atau leverage, dan mengasumsikan bahwa pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dapat mengatasi akumulasi risiko tersebut, padahal dalam kenyataannya tidak (IMF, 2010). Kebijakan moneter dapat mengambil tindakan "lean against the wind" untuk mengurangi gelembung harga aset, misalnya dengan menaikkan suku bunga ketika harga properti naik secara signifikan. Namun, pasar properti dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar suku bunga, terutama ekspektasi bahwa harga properti akan terus naik dan ketersediaan pembiayaan yang mudah dari bank, pengembang, utang luar negeri, dan

bahkan dari kenaikan harga properti itu sendiri. Kenaikan suku bunga juga berdampak pada seluruh sektor ekonomi, bukan hanya pasar properti. Begitu pula, pengaturan dan pengawasan mikroprudensial hanya fokus pada kesehatan individual lembaga keuangan untuk melindungi konsumen (nasabah dan investor). Padahal, pengaturan mikroprudensial dapat digunakan untuk mengurangi risiko gelembung properti, misalnya dengan meningkatkan persyaratan modal yang lebih tinggi untuk risiko tersebut. Namun, persyaratan modal yang berdasarkan perhitungan risiko cenderung berfluktuasi seiring dengan siklus ekonomi, lebih rendah ketika ekonomi sedang tumbuh dan lebih tinggi saat terjadi resesi. Dengan pertimbangan konseptual dan mendasar ini, kebijakan makroprudensial (pengaturan dan pengawasan) menjadi instrumen penting untuk mengatasi siklus keuangan dan risiko sistemik dalam sistem keuangan. Dan bank sentral merupakan lembaga yang paling tepat untuk melaksanakan tugas kebijakan makroprudensial tersebut.

Ketiga, fenomena volatilitas aliran modal asing semakin meningkat sejak krisis keuangan global 2008/2009. Pada periode 2009-2013, terjadi aliran masuk modal asing yang besar ke negara-negara Emerging Market Economies (EMEs). Hal ini disebabkan oleh tingginya likuiditas global akibat stimulus moneter yang besar dan suku bunga yang mendekati nol di negara maju, sehingga investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Namun, perubahan perilaku terjadi setelah FED melakukan taper tantrum pada Mei 2013. Aliran modal asing menjadi sangat volatil dan rentan terhadap perubahan persepsi investor yang sering kali bereaksi terhadap informasi dan berita terbaru.

Meskipun aliran modal asing yang besar memiliki manfaat bagi perekonomian, jika tidak dikelola dengan baik, dapat membuat EMEs rentan terhadap ketidakseimbangan makrofinansial dan risiko sistemik. Kawai dan Takagi (2008) mengidentifikasi tiga jenis risiko yang timbul dari aliran modal asing, yaitu risiko makroekonomi, risiko ketidakstabilan sistem keuangan, dan risiko sudden-stop. Risiko makroekonomi terkait dengan pertumbuhan kredit yang cepat, ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan, dan apresiasi nilai tukar yang terlalu kuat. Risiko ketidakstabilan sistem keuangan berkaitan dengan risiko maturitas dan valuta asing serta penurunan kualitas aset. Sedangkan risiko sudden-stop terjadi ketika aliran modal asing tiba-tiba berhenti.

Dalam menghadapi fenomena ini, kebijakan moneter yang hanya berfokus pada suku bunga atau pengaturan dan pengawasan mikroprudensial tidak cukup efektif. Kebijakan moneter kurang memperhitungkan akumulasi risiko sistemik dari asset price bubbles atau leverage, sementara pengaturan dan pengawasan mikroprudensial hanya fokus pada kesehatan individual lembaga keuangan. Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial menjadi instrumen penting untuk mengatasi prosiklisitas makrofinansial dan risiko sistemik dalam sistem keuangan. Bank sentral merupakan lembaga yang paling tepat untuk melaksanakan tugas kebijakan makroprudensial tersebut.

Pembalikan modal asing jangka pendek ke luar negeri dalam jumlah yang besar memerlukan respons suku bunga dan fleksibilitas nilai tukar untuk mengurangi risiko yang terkait. Namun, volatilitas aliran modal asing mengharuskan adanya pengaturan khusus dalam manajemen aliran modal asing untuk mendukung kebijakan suku bunga dan nilai tukar guna mencapai stabilitas moneter dan mendorong stabilitas sistem keuangan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana bank sentral dapat mengintegrasikan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal asing dalam suatu bauran kebijakan untuk mencapai stabilitas moneter dan mendukung stabilitas sistem keuangan?

Kerangka kebijakan moneter di bank sentral yang telah terbukti berhasil menjadi landasan yang kuat. Selama lebih dari dua dekade, bank sentral di berbagai negara, baik negara maju maupun negara emerging market, telah berhasil menciptakan stabilitas harga. Keberhasilan ini sebagian besar dapat dicapai karena pertukaran pengalaman yang erat di antara komunitas bank sentral dan penerapan kebijakan moneter yang kredibel. Kerangka kerja ini telah berhasil menurunkan tren inflasi jangka panjang, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan menurunkan suku bunga di banyak negara.

Beberapa fitur penting dari kerangka kerja yang mendukung kredibilitas kebijakan moneter termasuk: kejelasan target inflasi yang akan dicapai, adanya model analisis dan prakiraan makroekonomi yang kuat, konsistensi dalam kebijakan suku bunga untuk mencapai target inflasi, proses perumusan kebijakan yang formal dan reguler, serta publikasi prakiraan inflasi dan komunikasi lainnya untuk menstabilkan ekspektasi inflasi. Kerangka kerja ini dapat dengan mudah diperluas dengan memasukkan keterkaitan makrofinansial, terutama melalui sistem keuangan dan aliran modal asing, sebagai dasar dalam perumusan bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal asing.

Dalam semangat yang sama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) mendefinisikan "Stabilitas Sistem Keuangan" sebagai kondisi di mana sistem keuangan berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sistem Keuangan sendiri merupakan sistem yang terdiri dari lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.

Dalam definisi ini, terdapat lima aspek penting yang perlu ditekankan. Pertama, kesehatan individu lembaga

keuangan sangat penting, tetapi tidaklah cukup. Stabilitas sistem keuangan terkait dengan bagaimana sistem keuangan secara keseluruhan berfungsi untuk mendukung stabilitas ekonomi. Kedua, sejarah menunjukkan bahwa terdapat empat jenis keterkaitan makrofinansial yang sering menyebabkan krisis, yaitu: gelembung aset (baik finansial maupun properti), boom kredit, akumulasi utang yang berlebihan, dan pembalikan modal asing secara mendadak atau sudden-stop. Ketidakseimbangan yang muncul dari empat jenis keterkaitan tersebut seringkali menimbulkan prosiklisitas keuangan, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi pada masa ekspansi ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan tersebut melambat atau bahkan memperburuk siklus ekonomi pada masa resesi. Jika tidak dikelola dengan baik, prosiklisitas keuangan ini dapat mempercepat munculnya krisis. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi dan mencegahnya sejak dini. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Ketiga, kebijakan pengendalian gejala perekonomian domestik dan kemampuan untuk mengantisipasi gejala dari luar negeri sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan permintaan domestik yang jauh melebihi kapasitas perekonomian dapat menyebabkan overheating ekonomi, seperti tingginya inflasi, defisit transaksi berjalan, dan defisit fiskal. Ketidakseimbangan makroekonomi ini seringkali juga berdampak pada ketidakseimbangan makrofinansial, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, risiko terhadap stabilitas sistem keuangan juga dapat muncul dari dampak gejala ekonomi global atau regional. Hal ini bisa disebabkan oleh krisis yang terjadi secara mendadak atau perubahan kebijakan di negara lain. Gejala eksternal tersebut dapat menyebabkan sudden-stop, yaitu pembalikan modal asing yang tiba-tiba dan dalam jumlah besar, yang kemudian menimbulkan tekanan dan krisis nilai tukar, krisis pembayaran, krisis utang luar negeri, serta krisis finansial dan perekonomian. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan kebijakan makroekonomi (fiskal dan moneter), reformasi struktural di sektor riil, serta manajemen dan pengendalian aliran modal asing.

### KESIMPULAN

Krisis Keuangan Global 2008/2009 memiliki implikasi yang signifikan pada mandat dan kebijakan terhadap lembaga bank sentral. Sebelum krisis, bank sentral umumnya memfokuskan tujuannya pada stabilitas harga (inflasi) guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah krisis, terjadi evaluasi terhadap mandat bank sentral dengan mempertimbangkan stabilitas keuangan sebagai komplemen dari stabilitas moneter. Alat kebijakan makroprudensial menjadi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Evaluasi ini terutama terjadi karena krisis keuangan global mengungkapkan risiko keterkaitan antara sistem keuangan dan makroekonomi, yang dikenal sebagai keterkaitan makrofinansial. Bank sentral yang tidak lagi memiliki tugas pengawasan bank dan lembaga keuangan mikroprudensial juga tidak mampu memitigasi risiko makrofinansial tersebut. Sebagai hasilnya, fokus kebijakan moneter bank sentral pada stabilitas harga menjadi kurang memperhitungkan risiko krisis yang muncul dari keterkaitan tersebut. Dan

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan moral selama penelitian ini. Kolaborasi dan diskusi yang konstruktif sangat membantu dalam memperkaya isi dari jurnal ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- . Karim, Adiwarmanto A. 2017. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Radja Grafindo, cet 7.
- 1 Perry Warjiyo dan Judo Agung, *Mekanisme Transmisi Kebijakan moneter di Indonesia*. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, *Buletin Ekonomi dan Moneter dan Perbankan*, Juni 2008.
- Barro RJ, *Harapan Rasional dan Peran Kebijakan moneter*, *Jurnal Ekonomi Moneter*, 2(5), 2016.
- Chapra, Umer. 2016. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema. Terj. Hasan A 2009. *Al Qur'an: Menuju sistem Moneter yang Adil*, Terj. Toward a Just Monetary System, Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima.
- Ferry Irawan dan Sugiharso Saufan, *Kebijakan moneter pertumbuhan ekonomi dan pengujian Hipotesis Ekspektasi Rasional dengan analisis VAR*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol.6 no 1 tahun 2005.
- Hadi, Sholikhul dan M Romli, *Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini*, *Religi Social Education Laa Royba Jurnal*, vol 3 no 1, tahun 2021.

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- M Sufi, Penerapan DinarStabilitas ekonomi dan Moneter Indonesia,Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,vol 6 no 2, tahun 2020.
- Maqrobi,Saiful dan Amin P, Inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Uji Kausalitas Inflaton and Economic Growth: Testing for Causality,Jurnal Dinamika dan Keuangan Perbankan,vol 3 no 1 Mei 2011
- Mishkin, Frederich.2009. Ekonomi Uang Perbankan and Financial Market Jakarta: Salemba Empat. Muhammad,Manajemen Bank Syariah,2005.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Norman,Efrita dkk, Prinsip Kompensasi dalam Prespektif Islam, Reslaj, Jurnal PendidikanAgama Sosial Laa Royba ,vol 3 No 1 tahun 2021.
- Rahardja,Pratama dan Mandala Manurung,2008. Teori Ekonomi Makro Jakarta: LPFE UI Depok.
- Rohim, Fathur. 2011.Mekanisme transmisi Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga SBI sebagai sasaran Operasional Kebijakan moneter dan Variabel Makro Ekonomi Indonesia. Medan: USU Press.
- Sufi,Muhammad. Penerapan DinarStabilitas ekonomi dan Moneter Indonesia,Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,vol 6 no 2, tahun 2020.
- Sutawijaya,A. Pengaruh faktor faktor Ekonomi terhadap Inflasi Di Indonesia, Jurnal Organisasi dan Manajemen,85-101. Wahyudi,Amin. Jurnal Justitia Islamica, vol 10 no 1/Jan Juni 2013.